

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan tentang peran Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tawuran di Kota Padang, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Peran Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi Tawuran Di Kota Padang yaitu dengan melaksanakan himbauan, penyuluhan serta sosialisasi yang dilaksanakan setiap minggunya ke Sekolah-sekolah hingga kesetiap Kelurahan di Kota Padang. Selain itu di setiap hari Jumat tepatnya pada saat sholat Jumat Polisi mengadakan patroli di setiap daerah yang rawan terjadinya tawuran. Kemudian pada hari Sabtu malam juga diadakan patroli yang diberi nama dengan CiptaKondisi (CITKON). Kedua patroli tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengantisipasi tidak terjadi tawuran. Walaupun demikian menurut hemat penulis dalam menanggulangi tawuran khususnya bagian satbinmas Polresta Kota Padang belum berjalan optimal karena dilihat dari jumlah tawuran yang terjadi 4 tahun terakhir mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2022 mengalami peningkatan kasus tawuran di setiap tahunnya. Jumlah kasus tawuran sangat tinggi di tahun 2022, sampai di awal tahun ini tepatnya tanggal 15 Januari 2023 masih terjadi tawuran.

2. Kendala yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tawuran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagaiberikut:

a. Faktor *Internal*

- 1) Kekurangan anggota
- 2) Sarana atau fasilitas

b. Fakto *Eksternal*

- 1) Faktor orangtua
- 2) Faktor wilayah

B. Saran

Berdasarkan simpulan daripenelitian ini, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Dengan kurangnya anggota Kepolisian dalam melakukan patrol seharusnya Kepolisian memanfaatkan tekhnologi yaitu CCTV. Sehingga tidak perlu menambah anggota yang turun kelapangan untuk berpatroli. Karena sudah di pasang CCTV di setiap sudutdaerah-daerah yang rawan terjadi tawuran maupun di daerah yang tidak rawan terjadi tawuran. Hal ini dilakukan agar meminimalisir terjadinya tawuran di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh pihak Kepolisian.

2. Untuk Kepolisian Resor Kota Padang khususnya bagian Binmas, agar melakukan pendataan berupa statistik kriminal secara berkala. Agar dapat terdata kasus tawuran yang terjadi setiap tahunnya sehingga akan memudahkan mencari solusi untuk mengatasi tawuran. Karena setelah tahun 2012 tidak dilakukan perekapan jumlah tawuran hingga sekarang.
3. Selain peran Kepolisian yang dibutuhkan perandari pemerintah, sekolah, orangtua serta lingkungan masyarakat agar bekerjasama untuk menanggulangi tawuran. Masyarakat seharusnya bisa memanfaatkan siskamling sebagai pemberdayaan masyarakat untuk membantu Polisi dalam menanggulangi tawuran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amin Rais, 1997, *Refleksi Amien Rais Dari Persoalan Semut Sampai Gajah*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- AdamiChazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum DalamPraktek*, Sinar Grafik, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1986, *Penganatar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. RefikaAditama, Bandung.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Stepen Huwitz, 1986, *Kriminologi*, Saduran Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta.
- SuharsimiArikunto, 2002, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno Marto Kusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia no. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia no. 1 tahun 2023 tentang Pengaturan Hukum Pidana.

C. Sumber Lain

Ahmad Fauzan Shiddiq, 2021, 'Maraknya Tawuran Antar Pelajar yang Dapat Merusak Persatuan Kesatuan NKRI', *OSFPREPRINTS*, 10 November 2021.

Andika, 2022, *Tawuran Pelajar Sering Terjadi di Sumbar, Ada yang Tewas*, KATASUMBAR, Padang, 3 Agustus 2022, <https://katasumbar.com/tawuran-pelajar-sering-terjadi-di-sumbar-ada-yang-tewas/>

Brian Yesyurun Alberthus, 2022, 'Peran Kepolisian dalam Menyelesaikan Tawuran Antar Warga Sebagai Upaya Mewujudkan Perilaku Warga Negara yang Baik', *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume VI Nomor 1 Juni 2022.

Kejar Fakta, 2019, *Bulan Puasa, Tawuran di Kota Padang Antar Pemuda Merajalela, Garda NKRI Sumbar Minta Pemko Serius Urusi Pemuda*, Kejar Fakta, Padang, 9 Mei 2019, <https://kejarfakta.co/lainnya/data/1089/bulan-puasa-tawuran-di-kota-padang-antar-pemuda-merajalela-garda-nkri-sumbar-minta-pemko-serius-urusi-pemuda>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2017, *Tawuran: Bentuk Kesalahan Remaja Dalam Bereksistensi*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 25 April 2017, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1405/tawuran-bentuk-kesalahan-remaja-dalam-bereksistensi>.

Nur Ifitah Isnantiani, 2019, 'Hukum dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 1, April 2019.

Puja Octarisa, 2022, 'Peran Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di

Media Sosial', Program Strata-1, Universitas Bung Hatta, Padang.

Riki Chandra, 2022, *Fakta-fakta Tawuran Pelajar SMK di Padang 2 Orang di Bacok Celurit, 6 Ditangkap Polisi*, Suara sumbar.id, Padang, 29 Juli 2022, <https://sumbar.suara.com/read/2022/07/29/071500/fakta-fakta-tawuran-pelajar-smk-di-padang-2-orang-dibacok-celurit-6-ditangkap-polisi?page=all>.

Said Hasan Basri, 2017, 'Fenomena Tawuran Antar Pelajar Dan Intervensinya', Media Nelti, 7 Januari 2017.

Tri Jata Ayu Pramesti, 2022, *Arti Ultimatum Sebagai Sanksi Pamungkas*, Hukum Online.com, Jakarta, 15 Juli 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ultimum-remedium-sebagai-sanksi-pamungkas-lt53b7be52bcf59>.

Unga, 2020, 'Peran Kepolisian Sebagai *Criminal Justice Ssystem* Dalam Menanggulangi Tawuran Antar Pelajar (Studi Pada Madrasah Aliyah Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palopo)', Program Strata-1, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo.